KEKUASAAN

Nama Mahasiswa : Sabam Sirait Saogo

Email : sabamsiraitsaogosabam@gmail.com

No Bp :2010003600026

Universitas Ekasakti-AAI Padang
Fakultas Hukum

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sesuatu kelompok manusia untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan orang mempunyai tujuan itu . Maksud seseorang mempunyai kemampuan mempengaruhi tingkah laku orang lain atau sekelompok orang berdasarkan kewibawaan , wewenang , dan kekuatan fisik yang dimiliki . Dalam buku - buku dasar ilmu politik , Meriam Budiarjo menuliskan bawah : Menurut Robert M. Mac Iver ,” Kekuasaan sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orng lain , baik secara langsung dengan jalan memberi perintah , secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia . “ Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan (relationship) dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak yang lain untuk diperintah (the ruler ans the ruled) ,

satu pihak yang memberi perintah dan pihak lain mematuhi .
“Diantaranya banyak bentuk kekuasaan, ada satu bentuk yang sangat penting , yaitu kekuasaan politik . Dalam hal ini politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuk maupun akibat – akibatnya sesuai dengan pemegang kekuasaan itu sendiri .

Diantaranya konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan . Hal ini tidak mengherankan sebab konsep sangat krusial dalam sosial . Pada umumnya , dan ilmu politik khususnya pada suatu ketika politik dianggap identik dengan kekuasaan , dan kekuasaan dianggap sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan seperti , membagi sumber – sumber diantaranya kelompok – kelompok dalam masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa seorang pelaku mempunyai kekuasaan ?
2. Apa arti kekuasaan itu sendiri ?
3. Apa sumber dari kekuasaan ?

PEMBAHASAN

A. DEFENISI KEKUASAAN

Telah muncul banyak definisi beberapa ahli, seperti W. Connolly (1983) dan S. Lukes (1997) menganggap kekuasaan sebagai konsep yang dipertentangkan (a contested concept) yang artinya merupakan hal yang tidak dapat dicapai suatu consensus. Perumusan yang umumnya dikenal bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok manusia untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai tujuan itu. Dalam hal ini pelaku bisa berupa seorang, sekelompok orang, atau suatu kolektifitas.” Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan (relationship) dalam arti bahwa satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah. Satu pihak yang memberi perintah dan pihak lain yang mematuhi perintah.”

B. DEFINISI KEKUASAAN MENURUT BEBERAPA AHLI

1. **Max Weber** (Wirtschaft und Gesellschaft (1922)) : kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini.

2. **Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan** yang definisinya sudah menjadi rumusan klasik menyebutkan bahwa kekuasaan bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau kelompok lain mengarahkan tujuan ke pihak pertama.

3. **Barbara (Goodwin 2003)** Seseorang ahli kontemporer

mendefinisikan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipiih, seandainya ia tidak diinatkan. Dengan kata lain memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Biasanya kekuasaan diselenggarakan melalui isyarat yang jelas. Ini sering dinamakan kekuasaan manifest. Nmaun kadang-kadang isyarat itu tidak ada, misalnya dalam keadaan yang oleh cari Friendrich dinamakan the rule of anticipated reactions. Perilaku B ditentukan oleh reaksi yang diantisipasi jika keinginan A tidak dilakukan oleh B. Bnetuk kekuasaan ini sering dinamakan kekuasaan implisit. Suatu contoh dari kekuasaan manifest ialah jika seseorang polisi menghentikan seseorang pengendara motor karena melanggar peraturan lalu lintas. Contoh dari kekuasaan implisit ialah seorang anak sekolah membatalkan rencana untuk main bola dan memutuskan untuk membuat pekerjaan rumahnya, karena takut akan dimarahi bapaknya.

C. MACAM – MACAM CARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEKUASAAN

- a. Dengan cara kekerasan fisik
- b. Kekuatan dapat diselenggarakan lewat koersi, yaitu melalui ancaman akan diadakan sanksi
- c. Persuasion yaitu proses meyakinkan, berargumentasi atau menunjuk pada pendapat seorang ahli.
- d. Pemberian imbalan ialah pemerintah yang berupaya untuk mengatasi masalah.

D. SUMBER KEKUASAAN

Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan , kekayaan , kepercayaan atau agama.

1. Cakupan kekuasaan (Scoop of power)

Cakupan pada kekuasaan menunjuk pada kegiatan, perilaku, sikap, serta keputusan-keputusan yang menjadi objek dari kekuasaan. Misalnya seorang direktur perusahaan mempunyai kekuasaan untuk memberhentikan seorang karyawan, akan tetapi tidak mempunyai kekuasaan terhadap karyawan diluar hubungan kerja ini.

2. Wilayah kekuasaan (domain of power)

Menjawab pertanyaan siapapun yang dikuasai oleh orang atau sekelompok yang berkuasa, menunjuk pada pelaku, kelompok organisasi atau kolektifitas.

- Taloc persons

Seorang sosiolog yang terkenal mencenderung melihat kekuasaan sebagai senjata ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif dengan jalan membuat keputusan yang mengikat, dan dengan didukung oleh sanksi yang negatif.

Dalam perumusan Taloc persons yang diterjemahkan secara bebas mengatakan: "kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan dalam suatu sistem dan organisasi yang kolektif.

Kewajiban adalah sah jika mengangkut tujuan-tujuan kolektif. Jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi yang negatif sangatlah wajar, terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu. Jadi, Taloc persons melihat segi positif dari kekuasaan jika dihubungkan dengan/authoriti dan kemungkinan rencana dapat terlaksana dengan baik.

E. PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA SECARA VERTIKAL DAN HORIZONTAL

Pembagian kekuasaan dibedakan menjadi dua bagian yaitu,

1. Pembagian kekuasaan secara horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal dilakukan menurut lembaga tertentu. Pada tingkatan pemerintahan daerah, yakni antara pemerintah daerah (kepala daerah atau wakil kepala daerah) dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Tingkat propinsi, antara pemerintah propinsi (gubernur dan wakil gubernur) dan anggota dewan propinsi. Tingkat kabupaten antara pemerintah kabupaten/kota (bupati dan wakil bupati atau wali kota/wakil kota) dan DPRD kabupaten/kota.

2. kekuasaan secara vertikal pembagian

Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan

antara beberapa tingkatan pemerintah. Pembagian kekuasaan secara vertikal

dinegara Indonesia berlangsung dipemerintah pusat dan pemerintah daerah

(pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota) pembagian

Kekuasaan secara vertikal muncul akibat adanya asaa desentralisasi

dinegara kesatuan republik Indonesia.

F. JENIS-JENIS KEKUASAAN

1. Monarki dan Tirani

Monarki berasal dari kata “monarch” yang berarti raja, yaitu jenis kekuasaan yang mana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara

(kerajaan). Para pendukung monarki biasanya pendapat bahwa jenis kekuasaan yang dipegang oleh satu tangan ini lebih efektif untuk menciptakan suatu stabilitas atau konsensus didalam proses pembuatan kebijakan. bedebatan yang bertele-tele , pendapat yang beragam, atau persaingan antarkelompok menjadi relatif berkurang oleh sebab ada satu kekuasaan yang dominan.

Negara yang menerapkan jenis kekuasaan monarki hingga saat ini adalah Inggris, Swedia, Denmark, Belanda, Norwegia, Belgia, Luxemburg, Muangthai, dan Spanyol. Di negara ini, monarki menjadi instrumen pemersatu yang cukup efektif,

Tirani adalah bentuk pemerintahan yang buruk dan kejam muncul dalam sejarah politik dunia misalnya Kaisar Nero, Caligula, Hitler atau Stalin. Meskipun Hitler atau Stalin memerintah di era modern, tetapi jenis kekuasaan yang mereka jalankan pada hakikatnya terkonsentrasi pada satu tangan, dimana keduanya sama sekali tidak mau membagi kekuasaan dengan pihak lain, dan kerap kali bersifat kejam, baik terhadap rakyat sendiri maupun lawan politik.

2. Aristokrasi dan Oligarki

Dalam jenis kekuasaan monarki, raja atau ratu biasanya bergantung pada dukungan yang diberikan oleh penasihat dan birokrat. Jika kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh orang-orang ini (penasihat dan birokrat) maka jenis kekuasaan tidak lagi berada pada satu orang (mono) melainkan beberapa (few).

Aristokrasi sendiri merupakan pemerintahan oleh sekelompok elit dalam masyarakat, dimana mereka ini memiliki status sosial kekayaan, dan kekuasaan politik yang besar. Ketiga hal ini dinikmati secara turun-temurun (diwariskan), menurun dari orang tua kepada anak. Jenis kekuasaan aristokrasi ini disebut pula sebagai jenis kekuasaan kaum bangsawan (aristokrasi).

Biasanya, dimana ada kelas aristokrat yang dominan secara politik. Maka disana ada pula monarki. Namun, jenis kekuasaan oleh beberapa orang ini-aristokrasi-tidak bertahan lama, oleh sebab orang-orang yang orang tuanya bukan bangsawan pun bisa duduk mempengaruhi keputusan politik negara asalkan mereka berprestasi, kaya, berpengaruh, dan cerdas. Jika kenyataan ini terjadi, yaitu peralihan dari kekuasaan para bangsawan ke kelompok non-bangsawan, maka hal tersebut dinyatakan sebagai peralihan atau pergeseran dari aristokrasi menuju oligarki.

Diparlemen Inggris terdapat dua kamar yaitu House of Lords dan House of Commons. Kamar pertama berisikan kaum bangsawan (namanya didahului dengan Sir), sementara yang kedua banyak diisi

oleh kaum kaya yang berpengaruh, meskipun mereka bukan berdarah bangsawan. House of commons lebih menentukan jalannya parlemen inggris lebih ketimbang House of Lords. Dengan demikian, Oligarki lah yang lebih berkuasa di inggris ketimbang pada masa kini.

3. Demokrasi dan Mobokrasi

Jika kekuasaan dipegang oleh seluruh rakyat, bukan oleh mono atau few, maka kekuasaan tersebut dinamakan demokrasi. Di dalam sejarah politik, jenis kekuasaan demokrasi yang dikenal terdiri dari dua kategori. Kategori pertama adalah demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi perwakilan (representative democracy).

Demokrasi langsung berarti rakyat memerintah dirinya secara langsung, tanpa perantara. Salah satu pendukung demokrasi langsung adalah Jean Jacques Rousseau, dimana Rousseau ini mengemukakan 4 kondisi yang memungkinkan bagi dilaksanakannya demokrasi langsung yaitu :

- Jumlah warganegara harus kecil.
- Perwakilan atau kemakmuran harus dibagi secara merata (hampir merata).
- Masyarakat harus homogen (sama) secara budaya.
- Terpenuhi di dalam masyarakat kecil yang bermata pencarian pertanian.

Keterlibatan rakta menjadi tujuan utama penyelenggaraan negara. Masing-masing individu rakyat pasti ingin kepentinganyalah yang terlebih dahulu dipenuhi. Oleh sebab keinginan tersebut ingin didahulukan, dan pihak lain pun sama, dan jika hal ini berujung pada situasi chaos (kacau) bahkan perang (belum omnium contra omnes perang semua lawan semua), maka bukan demokrasi lagi namanya melainkan mobokrasi. Mobokrasi adalah bentuki buruk dari demokrasi, dimana rakyat memang berdaulat tapi negara berjalan dalam situasi perang dan tidak ada satu pun kesepakatan dapat dibuat secara damai.

4. Timokrasi

Menurut Stanley Rosen, Timokrasi adalah jenis kekuatan yang pernah disebutkan oleh Sokrates, filofof Yunani. Timokrasi dirujuk Sokrates dalam menggambarkan rezim pemerintah negara kota Sparta. Konsep ini mengacu pada “timocratic man”, yaitu seseorang

yang digandrung akan kemenangan dan kehormatan. Timokrasi terletak di posisi tengah antara Aristokrasi dan Oligarki. Juga sebut timokrasi adalah Aristokrasi yang tengah mengalami kemerosotan jenis kekuasaan.

5. Oklokrasi

Mirip dengan defisi Mobokrasi. Oklokrasi adalah situasi negara dalam anarki massa. Pemerintahan ini tidak legal dan konstitusional. Namun, karena biasanya kelompok-kelompok massa tersebut punya senjata atau massa besar, mereka memerintah memanfaatkan rasa takut. Amerika Serikat tahun 1930-an hampir masuk kedalam kategori ini, dimana keluarga-keluarga mafia mengendalikan negara secara illegal dan inkonstitusional.

6. Plutokrasi

Plutokrasi adalah jenis kekuasaan dimana negara “disetir” oleh orang-orang kaya. Plutokrasi ini mirip dengan Oligarki. Namun, plutokrasi terjadi takkalah tercipta suatu kondisi ekstrim ketimpangan antara “kaya” dan “miskin” di dalam suatu negara. Plutokrat (pasukan, senjata, teknologi). Dalam kondisi seperti ini, biasanya, secara de facto, lebih berkuasa ketimbang pemerintah resmi.

7. Kleptokrasi

Kleptokrasi adalah kekuasaan dimana pejabat publik menggunakan kekuasaannya untuk mencuri kekayaan negara (korupsi otomatis). Kleptokrasi juga disebut sebagai korupsi yang dilakukan oleh para pejabat tingkat tinggi yang secara sistematis menggunakan posisinya untuk mengalirkan dana publik ke dalam kantong-kantong pribadinya. Semakin massal tindak pidana oleh para pejabat publik, maka semakin mendekati suatu negara menganut jenis negara kleptokrasi.

G. BENTUK NEGARA

Bentuk negara yang dikenal hingga saat ini terdiri dari tiga bentuk yaitu Konfederasi, kesatuan dan federasi.

1. Negara konfederasi

Bagi L. Oppenheim “konfederasi terdiri dari negara beberapa negara yang berdaulat penuh untuk mempertahankan kedaulatan ekstrem

(keluar) dan intern (kedalam) bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap kekuasaan negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara konfederasi itu.

Menurut kepada definisi yang diberikan oleh L. Oppenheim di atas, maka konfederasi adalah negara yang terdiri persatuan beberapa negara yang berdaulat. Persatuan tersebut diantaranya dilakukan demi mempertahankan kedaulatan dari negara yang masuk kedalam konfederasi tersebut. Pada tahun 1963, negara Malaysia dengan Singapura pernah membangun suatu konfederasi, yang salah satu dimaksudkan untuk mengantisipasi politik luar negeri yang agresif dari Indonesia dimasa pemerintahan Sukarno. Malaysia dan Singapura mendirikan konfederasi lebih karena alasan masing-masing negara.

Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa konfederasi itu sendiri pada hakekatnya bukan negara, baik ditinjau dari sudut politik maupun dari sudut hukum internasional. Keanggotaan satu negara kedalam suatu konfederasi tidaklah menghilangkan ataupun mengurangi kedaulatan setiap negara yang menjadi anggota konfederasi.

2. Kesatuan

Negara kesatuan adalah negara yang pemerintah pusat atau nasional memegang kedudukan tertinggi, dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan sehari-hari. Tidak ada bidang kegiatan pemerintah yang diserahkan kepada konstitusi kepada satuan-satuan pemerintah lebih kecil (dalam hal ini, daerah atau provinsi).

Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat (nasional) bisa melimpahkan banyak tugas (melimpahkan wewenang) kepada kota – kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan-satuan pemerintah lokal. Namun pelimpahan itu, hanya diatur oleh undang-undang yang dibuat parlemen pusat (di Indonesia DPR-RI), bukan diatur dalam konstitusi (di Indonesia UUD 1945), dimana pelimpahan wewenang tersebut bisa saja ditarik sewaktu-waktu.

Mirim Budiarto menuliskan bahwa yang menjadi hakekat negara kesatuan adalah kedaulatannya tidak terbagi dan tidak terbatas, dimana hal tersebut dijamin dalam konstitusi. Meskipun daerah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri wilayahnya, tetapi itu bukan berarti pemerintah daerah berdaulat, sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi berada ditangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat –lah yang mengatur kehidupan penduduk daerah.

Keuntungan negara kesatuan adalah adanya keseragaman Undang – undang, karena aturan yang menyangkut ‘nasib’ daerah secara keseluruhan hanya dibuat oleh parlemen pusat. Namun negara kesatuan bisa tertimpah beban berat oleh sebab adanya perhatian ekstra pemerintah pusat terhadap masalah-masalah yang muncul di daerah.

3.Federasi

Negara federasi ditandai adanya pemisahan kekuasaan negara antara pemerintah nasional dengan unsur-unsur kesatuannya (negara bagian, provinsi, republik, kawasan, atau wilayah). Pembagian kekuasaan ini dicantumkan kedalam konstitusi (Undang-undang dasar). Sistem pemerintahan federasi sangat cocok negara-negara yang memiliki kawasan geografis luas, keragaman budaya daerah tinggi, dan ketimpangan ekonomi cukup tajam.

H. BENTUK PEMERINTAHAN

1. Bentuk Pemerintahan Parlementer

Dalam sistem parlementer, warga negara tidak memilih kepala

negara secara langsung. Mereka memilih anggota-anggota dewan perwakilan rakyat, yang diorganisasikan kedalam satu atau lebih partai politik. Umumnya, sistem parlementer mengindikasikan hubungan kelembagaan yang erat antara eksekutif dan legislatif.

Kepala pemerintahan dalam sistem parlementer adalah perdana menteri (disebut premier di Italia atau kanselir di Jerman). Perdana menteri memilih menteri-menteri serta membentuk kabinet berdasarkan "mayoritas" dalam parlemen (berdasarkan jumlah suara yang didapat masing-masing partai didalam pemilu).

2. Bentuk pemerintahan presidensial

Presidensial cenderung memisahkan kepala eksekutif dari dewan perwakilan rakyat. Sangat sedikit media tempat dimana eksekutif dan legislatif saling bertanya satu sama lain.

Dalam sistem presidensial, pemilu diadakan dua macam. Pertama untuk memilih anggota parlemen dan kedua untuk memilih presiden. Presiden inilah yang dengan hak prerogatifnya menunjuk pembantu-pembatunya, yaitu menteri-menteri didalam kabinet. Pola penunjukan menteri oleh presiden ini efektif dalam sistem dua partai, dimana dengan dua partai yang bersaing tersebut, pasti salah satu partai akan menang secara mayoritas. Didalam sistem banyak partai, penunjukan menteri oleh presiden juga dapat efektif jika salah satu partai menang secara 51%.

3. Semi presidensial

Shugart memuat pernyataan Maurice Duverger tahun 1980 tentang sistem pemerintahan campuran. Sistem campuran ini disebut semi prseidensial. Lebih lanjut Shugart menyatakan bahwa ciri utama dari semi presidensial adalah :

- Presiden dipilih langsung oleh rakyat;
- Presiden punya kewenangan konstitusional terbatas;

Terdapat pula perdana menteri dan kabinet, yang merupakan kepanjangan tangan dari mayoritas diparlemen.

KATA PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam suatu hubungan kekuasaan ada satu pihak yang lebih kuat dari pihak lain. Jadi, selalu ada hubungan tidak seimbangan inilah yang dering menimbulkan ketergantungan. Semakin tidak seimbang semakin besar pula ketergantungannya.

B. SARAN

Penulis mengharapkan makalah ini dapat memberi manfaat dan ilmu pengetahuan kepada para pembaca, dan disarankan untuk kepada pembaca agar mencari refrensi yang lebih banyak lagi, baik itu sosial media maupun media lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, *Justicia Islamica*, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, *Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia*, *Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
-

Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban*

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.

Larensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbang Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.